



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ONI YULFIAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DEPUTI**
3. NHK : **483552**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.293.925.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 514 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp. 1.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/80 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 332.925.000
3. Tanah Seluas 306 m2 di KAB / KOTA PADANG PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. Tanah Seluas 290 m2 di KAB / KOTA PADANG PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
8. Tanah Seluas 391 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 391.000.000
9. Tanah Seluas 7982 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 170.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS AVANZA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOBIL, FORD EVEREST Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.



125.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	193.600.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	460.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	136.365.672
<b>Sub Total</b>	Rp.	5.253.890.672
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	5.253.890.672

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.